

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.

Jabatan : Pengadministrasi Perkara Perdata

selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : NURDIN, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Perdata

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Andoolo, 2 Januari 2018

Pihak Pertama,

(MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.)

NIP. 19900622 201212 1 001

Pihak Kedua,



(NURDIN, S.H.)

NIP. 19840530 200912 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : Pengadilan Negeri Andoolo

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelaksanaan penaksiran biaya perkara yang kemudian dinyatakan dalam SKUM	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pembuatan dan penandatanganan pada SKUM Persentase pemberian nomor perkara dan penindasan stempel/ cap lunas pada SKUM 	100 % 100 %
2.	Pelaksanaan pencatatan biaya perkara keuangan perkara perdata dan permohonan biaya eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara ke dalam buku kas bantu Persentase pemindahbukuan transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara dari buku kas bantu ke dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara perdata Persentase pemindahbukuan transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara dari buku kas bantu ke dalam buku jurnal permohonan eksekusi dan buku keuangan biaya eksekusi 	100 % 100 % 100 %
3.	Pelaksanaan pencatatan penerimaan negara bukan pajak	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pencatatan penerimaan negara bukan pajak ke dalam buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan Persentase penyerahan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerimaan untuk disetor ke kas negara 	100 % 100 %
4.	Pelaksanaan pencairan biaya perkara	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penandatanganan dan pencairan cek bank biaya perkara 	100 %
5.	Pelaksanaan pengiriman biaya perkara	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengiriman biaya Perkara Banding ke Pengadilan Tinggi Persentase pengiriman biaya Perkara Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI Persentase pengiriman biaya bantuan delegasi ke Pengadilan pelaksana panggilan 	100 % 100 % 100 %
6.	Pelaksanaan pelaporan dan persuratan biaya perkara	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pembuatan laporan keuangan biaya perkara bulanan Persentase pembuatan surat pemberitahuan saldo biaya perkara ke KPPN Persentase pembuatan surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar Persentase pembuatan surat pemberitahuan penambahan panjar biaya perkara 	100 % 100 % 100 % 100 %
7.	Pelaksanaan pengisian data keuangan biaya perkara	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pengisian data keuangan biaya perkara di aplikasi CTS / SIPP, Komdanas, dan SMS Gate Away 	100 %



Pihak Kedua,

Andoolo, 2 Januari 2018

Pihak Pertama,